

**Nama : Nabila Anjani**

**NPM : 2213031077**

**Kelas C Pendidikan Ekonomi 2022**

---

## **EKONOMI INDUSTRI**

### **1. Analisis Konteks**

#### **a. Kelebihan dan Kekurangan Posisi Indonesia dalam Global Value Chains (GVC)**

Posisi Indonesia dalam Global Value Chains selama ini didominasi sebagai pemasok bahan mentah, khususnya sumber daya alam seperti nikel, batu bara, kelapa sawit, dan karet. Dari sisi kelebihan, posisi ini memberikan keuntungan komparatif yang kuat karena Indonesia memiliki cadangan sumber daya alam yang besar dan relatif murah. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai mitra penting dalam rantai pasok global, terutama bagi industri manufaktur dan energi di negara maju. Selain itu, ekspor bahan mentah relatif mudah dilakukan karena tidak membutuhkan teknologi tinggi, investasi besar, maupun kapasitas industri yang kompleks.

Namun, posisi tersebut juga memiliki kelemahan mendasar. Ketergantungan pada ekspor bahan mentah membuat Indonesia hanya memperoleh nilai tambah yang rendah dalam GVC. Sebagian besar keuntungan justru dinikmati oleh negara yang mengolah bahan tersebut menjadi produk setengah jadi atau produk akhir bernilai tinggi, seperti baterai kendaraan listrik, baja khusus, atau produk turunan kimia. Selain itu, posisi ini membuat perekonomian Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global dan memperkuat gejala *deindustrialisasi dini*, di mana kontribusi sektor manufaktur stagnan meskipun ekonomi tumbuh.

#### **b. Mengapa Indonesia Belum Mendapatkan Nilai Tambah Optimal dalam GVC**

Ada beberapa faktor utama yang menjelaskan mengapa Indonesia belum berhasil naik posisi dalam GVC. Pertama, keterbatasan kapasitas industri dan teknologi domestik. Pengolahan lanjutan membutuhkan investasi besar, teknologi tinggi, serta sumber daya manusia yang terampil, yang selama ini belum sepenuhnya dimiliki oleh industri nasional. Kedua, lemahnya keterkaitan industri hulu dan hilir di dalam negeri menyebabkan nilai tambah tidak terakumulasi secara domestik, melainkan bocor ke luar negeri.

Ketiga, kebijakan industri Indonesia dalam jangka panjang cenderung kurang konsisten. Selama bertahun-tahun, orientasi kebijakan lebih berfokus pada ekspor komoditas dan stabilitas makro dibandingkan pembangunan kapabilitas industri. Akibatnya, Indonesia terjebak pada posisi *resource-based economy* dan sulit melakukan *upgrading* dalam rantai nilai global.

## **2. Evaluasi Kebijakan**

### **a. Apakah Kebijakan Hilirisasi Meningkatkan Posisi Indonesia dalam GVC?**

Kebijakan hilirisasi, termasuk larangan ekspor bijih nikel, secara teoritis dapat meningkatkan posisi Indonesia dalam GVC. Dengan memaksa pengolahan dilakukan di dalam negeri, Indonesia mendorong terciptanya nilai tambah domestik, peningkatan investasi industri pengolahan, penciptaan lapangan kerja, serta transfer teknologi. Dalam konteks nikel, kebijakan ini terbukti menarik investasi smelter dan industri baterai kendaraan listrik, sehingga Indonesia mulai bergerak dari pemasok bahan mentah menuju produsen intermediate goods.

Namun, dari sisi ekonomi dan geopolitik, kebijakan ini tidak bebas risiko. Secara ekonomi, hilirisasi membutuhkan biaya investasi dan subsidi yang besar, serta berpotensi menciptakan ketergantungan baru jika industri hilir hanya dikuasai investor asing tanpa transfer teknologi yang nyata. Secara geopolitik, larangan ekspor dianggap sebagai kebijakan proteksionis oleh beberapa mitra dagang, terutama Uni Eropa, sehingga memicu sengketa dagang di WTO. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hilirisasi penting, implementasinya harus memperhatikan aturan perdagangan internasional dan diplomasi ekonomi.

### **b. Dampak terhadap Hubungan Dagang Internasional**

Kebijakan hilirisasi berdampak ganda terhadap hubungan dagang Indonesia. Di satu sisi, kebijakan ini meningkatkan posisi tawar Indonesia sebagai negara pemilik sumber daya strategis, khususnya dalam konteks transisi energi global. Di sisi lain, kebijakan larangan ekspor dapat memicu ketegangan dengan mitra dagang yang selama ini bergantung pada pasokan bahan mentah dari Indonesia. Jika tidak dikelola dengan baik, konflik dagang ini berpotensi menghambat akses pasar, investasi, dan kerja sama teknologi jangka panjang.

## **3. Sintesis dan Solusi: Strategi Kebijakan Alternatif**

Apabila saya bertindak sebagai penasihat ekonomi pemerintah, strategi yang saya usulkan adalah pendekatan upgrading GVC yang bertahap, inklusif, dan diplomatis. Pertama, hilirisasi perlu dilanjutkan tetapi disertai dengan kebijakan *performance-based incentives*. Artinya, insentif fiskal dan kemudahan investasi hanya diberikan kepada perusahaan yang benar-benar melakukan transfer teknologi, pengembangan pemasok lokal, dan peningkatan kapasitas tenaga kerja Indonesia.

Kedua, pemerintah perlu mendorong integrasi industri domestik melalui program *supplier development*, sehingga industri kecil dan menengah dapat masuk ke dalam rantai pasok industri besar dan global. Hal ini penting agar nilai tambah tidak hanya terkonsentrasi pada segelintir perusahaan besar atau investor asing.

Ketiga, Indonesia perlu mengombinasikan kebijakan industri dengan diplomasi perdagangan yang aktif. Alih-alih larangan ekspor permanen, Indonesia dapat menggunakan instrumen seperti *export levy*, *local processing requirements*, atau *joint venture obligations* yang lebih fleksibel dan lebih mudah diterima secara internasional. Pendekatan ini memungkinkan Indonesia meningkatkan nilai tambah dalam GVC tanpa merusak hubungan dagang dan reputasi sebagai mitra yang kooperatif.